

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk memperkecil jarak ketertinggalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju. Upaya pembangunan ekonomi yang umumnya diprakarsai pemerintah, agak terkendala akibat kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi yang produktif, terutama sumberdaya modal yang seringkali berperan sebagai katalisator pembangunan. Untuk mencukupi kekurangan sumber daya modal ini, maka pemerintah berusaha untuk mendatangkan sumberdaya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman. Dalam jangka pendek, utang luar negeri sangat membantu pemerintah Indonesia untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, dampak daripada pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan yang cukup besar. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat dipacu sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tetapi dampaknya dalam jangka panjang ternyata utang luar negeri pemerintah tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di Indonesia (Atmadja, 2000).

Sejak beberapa dekade terakhir utang luar negeri telah menjadi salah satu penyokong perkembangan ekonomi Indonesia. Namun demikian, pada awal pemerintahan orde baru, hal tersebut masih belum menjadi permasalahan besar bagi pemerintahan Indonesia dikarenakan pembangunan ekonomi besar besaran yang digalangkan oleh pemerintah dari berbagai sektor menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat pesat hingga akhir tahun 1996 yang memberikan dampak nyata di mata rakyat terhadap perkembangan perekonomian, sehingga utang luar negeri ketika itu memberikan dampak positif yang cukup besar. Di sisi lain, pendapatan yang diterima oleh pemerintah ternyata masih belum mampu

untuk memenuhi RAPBN yang ada, sehingga pemerintah tentu tidak dapat melakukan pelunasan terhadap utang utang sebelumnya, hal inilah yang memicu pemerintah terus melakukan peminjaman peminjaman terhadap negara negara asing ataupun lembaga keuangan internasional untuk menutupi defisit APBN yang berdampak pada pembengkakan jumlah utang dan menjadi salah satu faktor penyebab krisis ekonomi (Windijarto, 2009).

Peristiwa terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perekonomian Indonesia pada tahun 98' ialah krisis ekonomi yang dialami Indonesia dimana hal tersebut memberikan dampak yang sangat fatal ke berbagai hal. Salah satu yang terkena dampaknya adalah kurs mata uang rupiah, hal tersebut menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah mengalami pemerosotan yang sangat tajam terhadap kurs mata uang US dolar. Pemerosotan nilai mata uang rupiah memberikan dampak yang sangat fatal pula terhadap *kalkulasi* jumlah utang luar negeri pemerintah Indonesia sebab utang tersebut dalam bentuk US dolar, sehingga *kalkulasi* jumlah utang mengalami kenaikan yang sangat drastis, sedangkan pelunasan utang utang yang sudah tiba waktunya atau jatuh tempo harus segera dilaksanakan. Kurangnya pendapatan dalam negeri untuk memenuhi APBN serta defisitnya ditambah jumlah utang jatuh tempo yang sudah menumpuk menjadikan pemerintah Indonesia mengambil langkah instan dengan membuka pinjaman pinjaman baru yang bertujuan untuk membiayai pelunasan utang jatuh tempo. Hal inilah yang terus menerus terjadi dimana jumlah utang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi tidak tampak mengalami peningkatan, sehingga menjadi beban besar bagi APBN yang seolah tidak ada habisnya.

Selain itu, mudahnya proses peminjaman yang di iming imingi oleh pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional, memberikan dampak buruk terhadap *performa* pemerintah dalam melakukan upaya pengelolaan sektor sektor yang berpotensi besar terhadap peningkatan pendapatan dalam negerinya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah pinjaman utang yang dirasa tidak

sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sejak adanya pinjaman utang tersebut. APBN yang selalu defisit menunjukkan bahwa pemerintah seolah memaksakan pembiayaan pembiayaan yang seharusnya dapat di minimalisir penggunaannya atau bahkan tidak perlu, seperti program program yang sejatinya bersifat lebih kepada pemborosan anggaran atau untuk kesenangan/kemewahan sementara. Karena berdasarkan pengamatan dari para pengamat ekonomi yang mana hal itu pun dapat dilihat secara jelas oleh seluruh lapisan masyarakat bahwa selama ini anggaran belanja lebih banyak mengarah pada pemenuhan kebutuhan pejabat pemerintah serta pembangunan ibukota, sehingga yang menjadi alasan mengapa pemerataan ekonomi sulit untuk terlaksana (Widharma, Sri Budhi, & Marhaeni, 2013).

Selain itu, di balik kesepakatan pinjaman utang luar negeri antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing ataupun dengan lembaga keuangan internasional, tentunya ada kesepakatan kesepakatan lain yang tidak terekspos atau bahkan mungkin sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh publik. Kesepakatan kesepakatan tersebut biasanya berkaitan dengan hal hal yang bersifat ekonomi politik, seperti adanya campur tangan asing terhadap kebijakan kebijakan politik ekonomi. Dan tampaknya, pemerintah menyanggupi hal tersebut dengan membuka lebar pintu investasi bagi investor investor asing untuk masuk, sehingga dampaknya terlihat secara gamblang hingga saat ini dimana banyak sektor sektor produktif yang berada di bawah kekuasaan asing. Kesalahan kesalahan yang disebabkan kelalaian pemerintah dalam pengeloaan anggaran terutama dari pinjaman luar negeri berimplikasi terhadap APBN yang terus menerus terbebani dimana jumlah pinjaman yang terus membesar sementara penggunaan terhadap sektor sektor produktif sangat minim sekali sehingga pertumbuhan ekonomi akan selamanya terhambat (Manoppo, 2007).

Kesulitan kesulitan yang muncul sebab utang luar negeri ini salah satu yang paling pokok ialah dalam upaya pelunasan utang utang tersebut. Pada dasarnya

dalam upaya pelunasan utang meskipun dilakukan dengan cara cicilan dan terus menerus tentu akan sedikit demi sedikit berkurang. Namun fakta mengatakan bahwa sebagian besar bentuk pinjaman utang luar negeri Indonesia adalah riba dimana terdapat tambahan pengembalian utang yakni dalam bentuk persentase bunga, sehingga hal inilah yang menjadi permasalah serta permasalahan dalam upaya pembayaran kembali utang luar negeri tersebut. Utang luar negeri pemerintah -dalam hal ini transaksi peminjamannya terdapat/menggunakan bunga- dalam pandangan islam termasuk dalam jenis utang yang mengandung riba nasi'ah. Islam telah mengharamkan riba dan hal itu tertulis secara jelas di dalam alquran, sebab selain termasuk ke dalam golongan dosa besar, dampak negatifnya dari sisi duniawi benar benar fatal yakni sangat sangat merugikan. Sedangkan islam benar benar menghindari segala sesuatu dalam muamalah yang sifatnya merugikan pihak lain.

Pada dasarnya dalam islam hutang diperbolehkan tanpa adanya tambahan dalam pengembaliannya. Siddiqi juga menjelaskan terkait utang luar negeri atau pinjaman publik mengenai sumber utang tersebut serta kemana arah penggunaan utang tersebut, dalam konteks pemerintahan dimana ia membenarkan terkait adanya bentuk peminjaman kepada publik baik yang bersumber dari muslim maupun non muslim, dalam jumlah kecil maupun besar dimana tujuan dari penggunaan utang tersebut adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan pertahanan negara serta dapat digunakan untuk membayar utang yang telah mendesak. Melihat kondisi perkembangan utang luar negeri Indonesia peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sumber utang luar negeri yang diperoleh pemerintah Indonesia dengan menganalisis dan melihat sumber sumber serta arah penggunaan utang luar negeri tersebut yang ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam menggunakan teori M. Nejatullah Siddiqi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sumber dan penggunaan utang luar negeri Indonesia ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam menurut teori M. Nejatullah Siddiqi?

### **C. Pembatasan Masalah**

Judul skripsi pada penelitian ini terlihat jelas bahwa sifatnya masih umum. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah untuk penelitian ini. Pada penelitian kali ini tema/topik dari pada sumber dan penggunaan utang luar negeri Indonesia dibatasi pembahasannya yakni mengenai sumber dan penggunaan utang luar negeri ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pada periode tahun 2009-2018.

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

- a) Untuk menganalisis bagaimana sumber dan penggunaan utang luar negeri Indonesia.
- b) Untuk menganalisis bagaimana utang luar negeri dalam perspektif ekonomi islam menurut teori M. Nejatullah Siddiqi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

- a) Manfaat Teoritis :
  - a. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai kondisi, pengaruh dan perkembangan hutang luar negeri Indonesia.
  - b. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pandangan islam terhadap hutang negara.
- b) Manfaat Praktis :

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai pembelajaran, serta menambah wawasan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.
- b. Sebagai pelengkap dan pembanding penelitian sebelumnya, dan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

#### **F. Sistematik Penulisan**

Dalam proposal ini penulis menyusun lima bab uraian, dimana dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yaitu sebagai berikut, pada Bab I Pendahuluan penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah serta tujuan dan manfaat. Pada Bab II Telaah Pustaka dan Landasan Teori, penulis menjelaskan kajian teori dari penelitian terdahulu serta menambahkan penjelasan tentang perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta memaparkan terkait teori yang penulis gunakan pada penelitian ini untuk mengkaji mengenai sumber dan penggunaan utang luar negeri yang di lengkapi dengan kerangka berfikir. Pada Bab III Metode Penelitian, penulis menguraikan tentang pendekatan penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data yang diperoleh, teknik dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data. Pada Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, penulis menguraikan tentang pembahasan terkait tema dan menganalisis data. Pada Bab V Kesimpulan dan Saran.